



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
Tahun Anggaran 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Bintarawan, S.E.
NIP 197803261997031003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
V. Lampiran	67

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1	23
Tabel 2	24
Tabel 3	24
Tabel 4	24
Tabel 5	25
Tabel 6	25
Tabel 7	26
Tabel 8	27
Tabel 9	29
Tabel 10	30
Tabel 11	31
Tabel 12	31
Tabel 13	33
Tabel 14	34
Tabel 15	34
Tabel 16	35
Tabel 17	35
Tabel 18	36
Tabel 19	36
Tabel 20	36
Tabel 21	37
Tabel 22	37
Tabel 23	38
Tabel 24	38
Tabel 25	38
Tabel 26	39
Tabel 27	39
Tabel 28	40
Tabel 29	40
Tabel 30	41
Tabel 31	41
Tabel 32	42
Tabel 33	42
Tabel 34	43
Tabel 35	43
Tabel 36	44
Tabel 37	44
Tabel 38	45
Tabel 39	45
Tabel 40	46
Tabel 41	47
Tabel 42	47
Tabel 43	48
Tabel 44	48
Tabel 45	49
Tabel 46	50

Tabel 47	Mutasi Beban Persediaan	50
Tabel 48	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Juni 2022	51
Tabel 49	Mutasi Pada Beban Barang dan Jasa	52
Tabel 50	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	53
Tabel 51	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	54
Tabel 52	Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	55
Tabel 53	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	56
Tabel 54	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	56
Tabel 55	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	57
Tabel 56	Ditagihkan ke Entitas Lain Per 31 Desember 2023	58
Tabel 57	Kenaikan/Penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	58
Tabel 58	PNS Baru Bawaslu Kota Bandar Lampung	60
Tabel 59	Pejabat Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung	60
Tabel 60	Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung	61
Tabel 61	Rekening Pemerintah	61
Tabel 62	Rekening Pemerintah Lainnya	62
Tabel 63	Rekening Giro Kecamatan	62
Tabel 64	Pejabat Perbendaharaan	63
Tabel 65	Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023	65

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Bintarawan, S.E.
NIP 197803261997031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 0,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 16.137.905.920,00 atau mencapai 78,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.511.195.000,00. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.229.599.444,00 atau sebesar 95,93% dari alokasi anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp. 14.698.006.476,00 atau sebesar 77,28% dari alokasi anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp. 210.300.000,00 atau sebesar 99,76% dari alokasi anggarannya.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 10.758.232.713,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 10.560.200.000,00, Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp. 183.439.713,00 dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp. 14.593.000,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 152.800,00 dan Rp. 10.758.079.913,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, Beban, Surplus/(Defisit) dari operasi, Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional, Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 24.817,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 15.444.488.791,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 15.444.463.974,00). Surplus Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp. 1.610.000,00. Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 15.442.853.974,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 63.052.784,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 15.442.853.974,00 dan ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp. 0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 26.137.881.103,00 sehingga Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 10.758.079.913,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2023		% thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara Dan Hibah		0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	24.817	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	24.817	0	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara		0	0	0	0
B. Belanja Negara		0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2	20.511.195.000	16.137.905.920	79%	2.595.427.965
1. Belanja Pegawai	B.3	1.281.764.000	1.229.599.444	96%	374.229.306
2. Belanja Barang	B.4	19.018.626.000	14.698.006.476	77%	2.207.203.659
3. Belanja Modal	B.5	210.805.000	210.300.000	100%	13.995.000
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain		0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah		0	0	0	0
a. Dana Perimbangan		0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum		0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum		0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus		0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus		0	0	0	0

URAIAN	Ref	31 Desember 2023		% thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Non Fisik					
b. Dana Insentif Daerah		0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY		0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0
2. Dana Desa		0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah		0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara		20.511.195.000	16.137.905.920	79%	2.595.427.965
C. PEMBIAYAAN		0	0	0	0

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bintarawan, S.E.

NIP 197803261997031003



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	10.000.000.000	
Belanja Dibayar di Muka	C.2	85.000.000	
Persediaan	C.3	475.200.000	
Jumlah Aset Lancar		10.560.200.000	0
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	329.591.800	132.681.800
Akumulasi Penyusutan	C.5	(146.152.087)	(84.390.016)
Jumlah Aset Tetap		183.439.713	48.291.784
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.6	51.275.000	36.275.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.7	(36.682.000)	(21.514.000)
Jumlah Aset Lainnya		14.593.000	14.761.000
JUMLAH ASET		10.758.232.713	63.052.784
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.8	152.800	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		152.800	0
JUMLAH KEWAJIBAN		152.800	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.9	10.758.079.913	63.052.784
JUMLAH EKUITAS		10.758.079.913	63.052.784
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.758.232.713	63.052.784

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bintarayan, S.E.

NIP 197803261997031003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	24.817	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		24.817	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.229.599.444	374.229.306
Beban Persediaan	D.3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.743.804.736	1.408.037.077
Beban Pemeliharaan	D.5	419.241.987	51.804.286
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.974.912.553	747.362.296
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	76.930.071	19.954.286
JUMLAH BEBAN		15.444.488.791	2.601.387.251
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15.444.463.974)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya	D.8	1.610.000	0
Beban Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	1.610.000	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(15.442.853.974)	0
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	D.11	(15.442.853.974)	(2.601.387.251)

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bintarayan, S.E.

NIP 197803261997031003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	63.052.784	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(15.442.853.974)	(2.601.387.251)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	26.137.881.103	2.664.440.035
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	10.695.027.129	63.052.784
EKUITAS AKHIR	E.5	10.758.079.913	63.052.784

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bintarawan, S.E.

NIP 197803261997031003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

*Dasar Hukum
dan Profil
Bawaslu Kota
Bandar
Lampung*

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - q. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - r. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - s. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-27/PB/PB.6/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.
 - t. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.419487/2023 tanggal 30 November 2022.
2. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
 - 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
 - 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

- c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - i) rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan

- dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang Undang ini;
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini;
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Profil Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Bawasku Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B. Bawaslu Kabupaten Buru Selatan diklasifikasikan dalam Kelas B. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berkedudukan di Jalan Way Besai No. 1 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sejalan dengan Visi Bawaslu 2019 – 2024 “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*”, Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 (unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran menggunakan konsep single database yang dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Laporan BMN Satuan Kerja. Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sedangkan Laporan BMN terdiri dari Laporan Barang, Laporan Penyusutan BMN di Neraca, Laporan CRBMN dan Laporan Dummy.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 (unaudited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang jangka panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berhargadisajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau per-buatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/Aplikasi Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Revisi Anggaran

No	Revisi	Tanggal Revisi	Jumlah Pagu	Keterangan Revisi
1	0 (awal)	17 November 2022	Rp13.368.071.000	-
2	1 (DJA)	23 Desember 2022	Rp13.368.071.000	Revisi Pencadangan Anggaran
3	2 (KPA)	10 Februari 2023	Rp13.368.071.000	Revisi POK
4	3 (Kanwil)	13 Februari 2023	Rp13.368.071.000	Revisi halaman 3 DIPA untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2023
5	4 (KPA)	13 April 2023	Rp13.368.071.000	Revisi POK
6	5 (Kanwil)	14 April 2023	Rp13.368.071.000	Revisi halaman 3 DIPA untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023
7	7 (DJA)	21 Juli 2023	Rp11.911.770.000	Revisi anggaran terkait penghapusan Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran) / Relaksasi Automatic Adjustment
8	8 (DJA)	15 September 2023	Rp15.849.102.000	Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) honorarium Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) serta belanja operasional Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)
9	9 (KPA)	09 Oktober 2023	Rp15.849.102.000	Revisi POK
10	10 (DJA)	03 November 2023	Rp20.511.195.000	Anggaran Belanja Tambahan (ABT) terkait Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Pengawasan Logistik
11	11 (Kanwil)	30 November 2023	Rp20.511.195.000	Revisi perubahan anggaran dalam 1 RO pada PN ABT

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahun 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Belanja:		
Belanja Pegawai	1.334.494.000	1.281.764.000
Belanja Barang	11.851.077.000	19.018.626.000
Belanja Modal	182.500.000	210.805.000
Jumlah Belanja	13.368.071.000	20.511.195.000

*Pendapatan
Rp24.817,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.817,00 dan Rp0,00.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
PNBP	24.817	0	100
Total	0	0	0

Realisasi PNBP diperoleh dari bunga giro yang terdapat di rekening giro Sekretariat Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Pengembalian Bunga Giro Ad-Hoc

No	Nama Kecamatan	Bunga Giro (Rp)
1	Panjang	1.191
2	Sukabumi	1.313
3	Teluk Betung Barat	1.658
4	Labuhan Ratu	2.736
5	Teluk Betung Selatan	5.221
6	Tanjung Karang Timur	7.336
7	Kedaton	1.737

8	Way Halim	3.625
TOTAL		24.817

PNBP yang diperoleh telah disetorkan dengan NTPN 1EA6B8N3EB10150J tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp24.817,00.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp16.137.905.920,00*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Bawaslu Kota Bandar Lampung pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.137.905.920,00 atau sebesar 78,68% dari anggaran belanja sebesar Rp20.511.195.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.281.764.000	1.229.841.674	95,95
Belanja Barang	19.018.626.000	14.765.004.031	77,63
Belanja Modal	210.805.000	210.300.000	99,76
Total Belanja Kotor	20.511.195.000	16.205.145.705	79,01
Pengembalian Belanja	0	67.239.785	0
Total	20.511.195.000	16.137.905.920	78,68

Realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 521,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, berikut perbandingan realisasi belanja per 31 desember 2023 dan 31 Desember 2022:

*Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	1.229.599.444	374.229.306	228,63
Belanja Barang	14.698.006.476	2.207.203.659	568,95
Belanja Modal	210.300.000	13.995.000	1402,68
Total	16.137.905.920	2.595.427.965	521,78

Secara umum terdapat kenaikan belanja per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, yang disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 228,63% dibandingkan per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung.
2. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 568,95% dibandingkan per 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan adanya realisasi anggaran yang cukup besar terutama pada Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc yang didalamnya terdapat realisasi belanja barang berupa sewa kendaraan operasional dan belanja honorarium, serta operasional Ad-Hoc.
3. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1402,68% dibandingkan per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya pengadaan fasilitas perkantoran untuk yang lebih besar pada tahun 2023 daripada tahun 2022 seperti pembelian Laptop, Kamera Zoom, Kamera Digital, Meja, Kursi, AC, Hard Disk, dan Lemari.

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp16.137.905.920,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp16.205.145.705,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Pengembalian belanja sebesar Rp67.239.785,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

Rincian pengembalian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

RINCIAN PENGEMBALIAN BELANJA					
NO	AKUN	KETERANGAN	NO SP2D/NTPN	TANGGAL SETOR	JUMLAH (Rp)
1	511119	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Maret dan April 2023 untuk 3 Pegawai PNS Bawaslu Kota Bandar Lampung	230171301005994	11 April 2023	76

2	511119	Pembayaran Kekurangan THR Tahun 2023 Untuk 3 Pegawai Bawaslu Kota Bandar Lampung	230171501001358	10 April 2023	86
3	511119	Pembayaran Kekurangan THR Tahun 2023 Untuk 3 Pegawai Bawaslu Kota Bandar Lampung	230171505000260	10 April 2023	68
4	511129	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Oktober 2023	AD54245KN9IHF 0AU	28 Desember 2023	242.000
TOTAL					242.230

Selanjutnya, rincian pengembalian belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Pengembalian Belanja Barang

RINCIAN PENGEMBALIAN BELANJA					
NO	Akun	KETERANGAN	NTPN	TANGGAL SETOR	JUMLAH (Rp)
1	524113	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6EED12CNR20 5TKHC	13 Desember 2023	300.000
2	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	2E41D522744T S0IP	28 Desember 2023	1.100.000
3	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	67F823977F05 20MF	28 Desember 2023	3.291.000
4	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	EB4270JUNV8 VR0QO	28 Desember 2023	11.488.645

5	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	3C3E70JUNV8 VR0SK	28 Desember 2023	322.000
6	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	829852CPNKD OL0UI	28 Desember 2023	945.400
7	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	2591D2CPNK DOL11C	28 Desember 2023	3.914.260
8	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	02D430JUNV8 VR1C8	28 Desember 2023	4.835.000
9	521211	Pengembalian Belanja Bahan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	1D8096QT6P9 MM1KT	28 Desember 2023	201.250
10	521211	Pengembalian Belanja Bahan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	5D481522744T S1Q5	28 Desember 2023	10.000.000
11	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	B30C56QT6P9 MM1T1	28 Desember 2023	13.830.000
12	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	ECA3D2CPNK DOL20A	28 Desember 2023	1.505.000
13	521211	Pengembalian Belanja Bahan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	0FA4A522744 TS21V	28 Desember 2023	320.000
14	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	EE30545KN9I HF23Q	28 Desember 2023	2.320.000
15	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar	94B095UFMU NA9254	28 Desember 2023	10.725.000

		Lampung Tahun 2023			
16	521211	Pengembalian Belanja Bahan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung Tahun 2023	121037NAMJS 33264	28 Desember 2023	1.000.000
TOTAL					66.997.555

Belanja Pegawai
Rp1.229.599.444,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.229.599.444,00 dan Rp374.229.306,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	193.272.960	48.145.920	301
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.856	616	526
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	7.015.968	1.650.816	325
Belanja Tunjangan Anak PNS	2.613.390	605.184	332
Belanja Tunjangan Struktural PNS	13.720.000	3.920.000	250
Belanja Tunjangan PPh PNS	17.385.900	6.512.650	167
Belanja Tunjangan Beras PNS	9.776.700	2.607.120	275
Belanja Uang Makan PNS	32.007.000	15.927.000	101
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.360.000	2.960.000	250
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	716.087.900	212.814.000	236
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	227.598.000	79.086.000	188
Jumlah Belanja Kotor	1.229.841.674	374.229.306	229
Pengembalian Belanja Pegawai	242.230	-	-
Total	1.229.599.444	374.229.306	229

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 229% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi

Lampung. Adanya pengembalian belanja pegawai merupakan pembulatan kekurangan gaji dan THR bagi 3 (empat) orang PNS yang sebelumnya merupakan CPNS.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp672.807.048,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang digunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji PNS serta Uang Makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2023;
2. Pembayaran Tunjangan Struktural bulan Januari s.d. Desember 2023;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS bulan Januari s.d. Desember 2023;
4. Belanja Uang Kehormatan Ketua dan Anggota bulan Januari s.d. Desember 2023;
5. Pembayaran Gaji ke-13 dan THR PNS tahun 2023 dan;
6. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Uang Kehormatan Tahun 2023;

Belanja Barang
Rp14.698.006.476,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.698.006.476 atau 77.63% dari anggaran belanja barang sebesar Rp19.018.626.000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	832.767.000	818.019.521	98.23%
Belanja Barang Non Operasional	7.934.803.000	7.222.209.200	91.02%
Belanja Jasa	2.580.459.000	2.292.914.770	88.86%
Belanja Pemeliharaan	529.599.000	422.532.987	79.78%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.140.998.000	4.009.327.553	55.15%
Jumlah Belanja Kotor	19.018.626.000	14.765.004.031	77.63%
Pengembalian Belanja	0	66.997.555	0%
Total	19.018.626.000	14.698.006.476	77.63%

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.698.006.476.00 dan Rp2.207.203.659.00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 565,91% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Rincian Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

*Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	818.019.521	871.917.090	-6,18
Belanja Barang Non Operasional	7.222.209.200	229.752.950	3043,47
Belanja Jasa	2.292.914.770	306.367.037	648,42
Belanja Pemeliharaan	422.532.987	51.804.286	715,63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.765.004.031	747.362.296	1875,62
Jumlah Belanja Kotor	14.765.004.031	2.207.203.659	568,95
Pengembalian Belanja	66.997.555	0	100
Total	14.698.006.476	2.207.203.659	565,91

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 565,91% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta realisasi anggaran yang cukup besar terutama pada Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc yang didalamnya terdapat realisasi belanja barang berupa sewa kendaraan operasional dan belanja honorarium. serta operasional Ad-Hoc.

Dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.698.006.476,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni (RM).

*Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	609.639.521	850.897.408	-28
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	1.620.000	122
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	172.380.000	18.610.000	826
Belanja Barang Operasional Lainnya	32.400.000	0	100
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	789.682	-100
Belanja Bahan	1.526.659.200	138.352.950	1003
Belanja Honor Output Kegiatan	5.695.550.000	91.400.000	6131
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0

Lainnya			
Belanja Langganan Listrik	110.172.730	23.519.687	368
Belanja Langganan Telepon	7.400.000	0	100
Belanja Langganan Air	12.813.000	1.594.900	703
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0
Belanja Sewa	1.886.102.640	179.512.450	951
Belanja Jasa Profesi	125.000.000	63.200.000	98
Belanja Jasa Lainnya	151.426.400	38.540.000	293
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.776.000	30.533.000	672
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186.756.987	21.271.286	778
Belanja Perjalanan Biasa	180.852.537	98.453.447	84
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.005.460.000	79.130.000	2434
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.442.281.000	483.457.000	198
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	380.734.016	86.321.849	341
Jumlah Belanja Kotor	14.765.004.031	2.207.203.659	569
Pengembalian Belanja Barang	66.997.555	0	100
Total	14.698.006.476	2.207.203.659	566

Realisasi Belanja Barang digunakan untuk:

1. Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kota Bandar Lampung;
2. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung;
3. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
4. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandar Lampung;
5. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandar Lampung;
6. Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kota Bandar Lampung;
7. Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
8. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
9. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung;
10. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Kota Bandar Lampung;
11. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
12. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
13. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kota Bandar Lampung;

14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Kota Bandar Lampung;
15. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
16. Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Kota Bandar Lampung;
17. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kota Bandar Lampung;
18. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kota Bandar Lampung;
19. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
20. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Belanja Modal
Rp210.300.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp210.300.000,00 dan Rp13.995.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 senilai Rp210.300.000,00 adalah sebagai berikut:

*Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.300.000	6.500.000	2904,62
Belanja Modal Lainnya	15.000.000	7.495.000	100,13
Jumlah Bruto	210.300.000	13.995.000	1402,68
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	210.300.000	13.995.000	1402,68

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1402,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta dan pada periode 31 Desember 2023 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp210.300.000,00 yang berupa belanja:

Tabel 14. Rincian Barang yang berasal dari Belanja Modal

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit
1	P.C Unit	20.000.000	1
2	Lap Top	82.000.000	5
3	Brandkas	4.500.000	1
4	Meja Kerja Kayu	9.000.000	6
5	Kursi Besi/Metal	9.000.000	7
6	A.C. Split	22.900.000	5
7	Camera Digital	10.000.000	1
8	Camera Conference	25.000.000	1
9	Lemari Besi/Metal	6.400.000	2
10	Meja Rapat	4.500.000	3
11	Hard Disk	2.000.000	2
12	Software	15.000.000	2
	Jumlah	210.300.000	36

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp195.300.000,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp195.300.000,00 dan Rp6.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 2904,61% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dan pada periode sampai 31 Desember 2023 terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp195.300.000,00 yang berupa belanja:

Tabel 15. Rincian Barang yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit
1	P.C Unit	20.000.000	1
2	Lap Top	82.000.000	5
3	Brandkas	4.500.000	1
4	Meja Kerja Kayu	9.000.000	6
5	Kursi Besi/Metal	9.000.000	7
6	A.C. Split	22.900.000	5
7	Camera Digital	10.000.000	1
8	Camera Conference	25.000.000	1
9	Lemari Besi/Metal	6.400.000	2
10	Meja Rapat	4.500.000	3
11	Hard Disk	2.000.000	2
	Jumlah	195.300.000	34

Perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.300.000	6.500.000	2904,62
Jumlah Bruto	195.300.000	6.500.000	2904,62
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	195.300.000	0	2904,62

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit
1	P.C Unit ok	20.000.000	1
2	Lap Top	82.000.000	5
3	Brandkas	4.500.000	1
4	Meja Kerja Kayu	9.000.000	6
5	Kursi Besi/Metal	9.000.000	7
6	A.C. Split	22.900.000	5
7	Camera Digital	10.000.000	1
8	Camera Conference	25.000.000	1
9	Lemari Besi/Metal	6.400.000	2
10	Meja Rapat	4.500.000	3
11	Hard Disk	2.000.000	2
	Jumlah	195.300.000	34

*Belanja Modal
Lainnya
Rp15.000.000,00*

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp7.495.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar 100,13%. Perbandingan realisasi belanja modal lainnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	15.000.000	4.795.000	100,13
Jumlah Bruto	15.000.000	4.795.000	100,13
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total	15.000.000	4.795.000	100,13

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 berupa pengembangan Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit
1	Software (Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung) Alamat website: https://ppid.bandarlampung.bawaslu.go.id	15.000.000	1
	Jumlah	15.000.000	1

Belanja Modal Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Daftar Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP
1	8010101001	Software	1
2	8010101001	Software	2

*Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp10.000.000.000,00*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. 1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	10.000.000.000	0
Total	10.000.000.000	0

Rincian saldo kas lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah senilai Rp10.000.000.000,00 adalah Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung.

*Belanja Dibayar Dimuka
Rp85.000.000,00*

C. 2 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 22. Perbandingan Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sewa Dibayar Dimuka	85.000.000	0
	Total	85.000.000	0

Tabel 23. Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

No	Nama Sewa	Sewa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023
1	Sewa Gedung	45.000.000
2	Sewa Gedung (Gakkumdu)	20.000.000
3	Sewa Sarana dan Prasarana (Gakkumdu)	20.000.000

Persediaan
Rp475.200.00,00

C. 3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp475.200.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(Dalam rupiah)

Nama	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	475.200.000	0
Total	475.200.000	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Mutasi nilai persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Nilai Persediaan

(Dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Perolehan Lainnya	475.200.000
Reklasifikasi Masuk	0
Jumlah Mutasi Tambah	475.200.000
Mutasi Kurang:	

Pemakaian	0
Keluar Lainnya	0
Reklasifikasi Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	475.200.000

Mutasi Tambah Perolehan Lainnya sebesar Rp475.200.000,00 diperoleh dari Belanja Bahan (521211) berupa Penanda Atribut PTPS di Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang belum terdistribusi sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga perlu dilakukan pencatatan sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016 hal Pedoman Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Persediaan

(Dalam rupiah)

No	Nama Persediaan	Volume (Paket)	Harga (Rp)
1	Alat Penanda Identitas PTPS	2.880	475.200.000

Alat Penanda Identitas PTPS didistribusikan ke PTPS secara serentak pada tanggal 22 Januari 2024.

*Peralatan dan
Mesin
Rp329.591.800,00*

C. 4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp329.591.800,00 dan Rp132.681.800,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27. Saldo Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023*

(Dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	329.591.800	132.681.800
Total		329.591.800	132.681.800

Saldo awal peralatan dan mesin yang dimiliki Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung senilai Rp132.681.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 28. Saldo Awal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Saldo per 31 Desember 2022
Transportable Generating Set	1	19.800.000
Lemari Besi/Metal	1	2.500.000
Alat Penghancur Kertas	1	2.950.000
Mesin Absensi	1	3.000.000
LCD Projector/Infocus	1	4.985.000
Meja Kerja Kayu	3	3.960.000
Kursi Besi/Metal	1	1.100.000
A.C. Split	4	18.600.000
Sound System	1	6.160.000
Handy Cam	1	4.700.000
Thermometer Gun	1	1.980.000
P.C Unit	3	24.598.300
Lap Top	1	6.500.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	7.348.500
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	24.500.000
Jumlah	25	132.681.800

Rincian saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp329.591.800,00 per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 29. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023*

(Dalam Rupiah)

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Nilai
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	3	8.900.000
2	3050104007	Brandkas	1	4.500.000
3	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	2.950.000
4	3050105017	Mesin Absensi	1	3.000.000
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	4.985.000
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	9	12.960.000
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	8	10.100.000
8	3050201008	Meja Rapat	3	4.500.000
9	3050204004	A.C. Split	9	41.500.000
10	3050206008	Sound System	1	6.160.000
11	3050206046	Handy Cam	1	4.700.000
12	3060102128	Camera Digital	1	10.000.000

13	3060102165	Camera Conference	1	25.000.000
14	3070101171	Thermometer Gun	1	1.980.000
15	3100102001	P.C Unit	4	44.598.300
16	3100102002	Lap Top	6	88.500.000
17	3100201012	Hard Disk	2	2.000.000
18	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	8.958.500
19	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	24.500.000
20	3010304001	Transportable Generating Set	1	19.800.000
Jumlah			60	329.591.800

Adapun mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	132.681.800
Mutasi Tambah:	
Pembelian	195.300.000
Perolehan Lainnya	1.610.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7.224.250
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	7.224.250
Saldo per 31 Desember 2023	329.591.800
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(146.152.087)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	215.017.748

Mutasi tambah yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp195.300.000,00 serta Perolehan lainnya diperoleh dari Pengadaan Belanja Modal pada Tahun 2023, yang merupakan bonus atas pembelian dengan nomor SP2D 230171303001732 tanggal 28 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Perolehan Lainnya per 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit	Total
1	Printer EPSON	1.610.000	1	1.610.000
2	Printer Canon	769.000	3	2.307.000
Jumlah			4	3.917.000

Dengan Printer Canon merupakan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel.

Mutasi tambah yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp195.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Mutasi Tambah atas Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Unit
1	P.C Unit	20.000.000	1
2	Lap Top	82.000.000	5
3	Brandkas	4.500.000	1
4	Meja Kerja Kayu	9.000.000	6
5	Kursi Besi/Metal	9.000.000	7
6	A.C. Split	22.900.000	5
7	Camera Digital	10.000.000	1
8	Camera Conference	25.000.000	1
9	Lemari Besi/Metal	6.400.000	2
10	Meja Rapat	4.500.000	3
11	Hard Disk	2.000.000	2
	Jumlah	195.300.000	34

Mutasi Tambah senilai Rp7.224.250,00 per 31 Desember 2023 dan Mutasi Kurang senilai Rp7.224.250,00 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Saldo per 31 Desember 2023
Mutasi Tambah :		
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3	7.224.250
Mutasi Kurang :		
Penghentian aset dari penggunaan	(3)	(7.224.250)
Jumlah	0	0

Rincian barang Mutasi Tambah senilai Rp7.224.250,00 per 31 Desember 2023 dan Mutasi Kurang senilai Rp7.224.250,00 per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Barang Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/ Type	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
1	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	HP M102A	1.474.250
2	3050204004	A.C Split	2	Panasonic	4.650.000
3	3050201003	Kursi Besi/Metal	6	Lunar	1.100.000
Jumlah					7.224.250

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp146.152.087,00
)*

C. 5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp146.152.087,00) dan (Rp84.390.016,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	(146.152.087)	(84.390.016)
Akumulasi Penyusutan		(146.152.087)	(84.390.016)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 September 2023 berupa penyusutan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Akumulasi Penyusutan
Transportable Generating Set	1	(11.314.287)
Lemari Besi/Metal	3	(2.140.000)
Brandkas	1	(900.000)
Alat Penghancur Kertas	1	(1.180.000)
Mesin Absensi	1	(2.700.000)
LCD Projector/Infocus	1	(1.994.000)
Meja Kerja Kayu	9	(5.310.000)
Kursi Besi/Metal	8	(2.300.000)
Meja Rapat	3	(450.000)
A.C. Split	9	(21.340.000)
Sound System	1	(4.928.000)
Handy Cam	1	(4.700.000)
Camera Digital	1	(2.000.000)
Camera Conference	1	(5.000.000)
Thermometer Gun	1	(1.584.000)
P.C Unit	4	(24.598.300)
Lap Top	6	(22.937.500)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	(6.026.000)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	(24.500.000)
Hard Disk	2	(250.000)
Jumlah	60	(146.152.087)

Aset Tak Berwujud
Rp51.275.000,00

C. 6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp51.275.000,00 dan Rp36.275.000,00. Aset yang tidak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	51.275.000	36.275.000
Saldo	51.275.000	36.275.000

Saldo awal aset tak berwujud yang dimiliki Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung senilai Rp36.275.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Saldo Awal Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe/Alamat ID	NUP	31 Desember 2022
1	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Bandar Lampung https://www.bandarlampung.bawaslu.go.id	1	28.780.000
2	Software Komputer	Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung https://ppid.bandarlampung.bawaslu.go.id	2	7.495.000
Saldo				36.275.000

Mutasi Tambah senilai Rp15.000.000,00 per 31 Desember 2023 yang merupakan pengembangan nilai aset pada Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Mutasi Kurang senilai Rp0,00 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 September 2022	36.275.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	15.000.000
Mutasi Kurang:	
Penghapusan BMN Hibah Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	51.275.000
Akumulasi penyusutan	(36.682.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	21.889.500

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berupa software komputer yang merupakan Website Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung per 31

Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe/Alamat ID	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Bandar Lampung https://www.bandarlampung.bawaslu.go.id	28.780.000	28.780.000
2	Software Komputer	Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung https://ppid.bandarlampung.bawaslu.go.id	22.495.000	7.495.000
	Saldo		51.275.000	36.275.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp36.682.500,00)

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp36.682.750,00) dan (Rp21.514.000,00). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud (ATB) yang mencakup penurunan kapasitas satu masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh dan atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi aset. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Aset Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
Aset Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tidak Berwujud		
Software	(36.682.500)	(21.514.000)
Saldo	(36.682.500)	(21.514.000)

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp152.800,00

C. 9 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp152.800,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	152.800	0
Jumlah		152.800	0

Saldo belanja barang yang masih harus dibayar merupakan belanja untuk tagihan air bulan Desember 2023 pada Gedung Sewa Gakkumdu Kota Bandar Lampung yang akan dibayarkan pada tahun 2024.

Ekuitas
Rp10.758.079.913,
00

C. 9 Ekuitas

Ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.758.079.913,00 dan Rp63.052.784,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp24.817,00

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.817,00 dan Rp. 0,00. Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung merupakan Satuan Kerja non BLU sehingga tidak mempunyai pendapatan.

*Tabel 43. Perbandingan Pendapatan
per 31 Desember 2023*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
PNBP	24.817	0	100
Total	0	0	0

PNBP diperoleh dari bunga giro yang terdapat di rekening giro Sekretariat Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Pengembalian Bunga Giro Ad-Hoc

No	Nama Kecamatan	Bunga Giro (Rp)
1	Panjang	1.191
2	Sukabumi	1.313
3	Teluk Betung Barat	1.658
4	Labuhan Ratu	2.736
5	Teluk Betung Selatan	5.221
6	Tanjung Karang Timur	7.336
7	Kedaton	1.737
8	Way Halim	3.625
TOTAL		24.817

PNBP yang diperoleh telah disetorkan dengan NTPN 1EA6B8N3EB1015OJ tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp24.817,00.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.229.599.444,00 dan Rp374.229.306,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

*Tabel 45. Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	193.272.960	48.145.920	301%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	3.856	616	526%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7.015.968	1.650.816	325%
Beban Tunj. Anak PNS	2.613.390	605.184	332%
Beban Tunj. Struktural PNS	13.720.000	3.920.000	250%
Beban Tunj. PPh PNS	17.385.900	6.512.650	167%
Beban Tunj. Beras PNS	9.776.700	2.607.120	275%
Beban Uang Makan PNS	32.007.000	15.927.000	101%
Beban Tunjangan Umum PNS	10.360.000	2.960.000	250%
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	716.087.900	212.814.000	236%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	227.598.000	79.086.000	188%
Total	1.229.599.444	374.229.306	229%

Beban pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 229% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2022. Kenaikan beban pegawai disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat

Bawaslu Provinsi Lampung.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban pegawai pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

Beban Persediaan
Rp0,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 46. Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Perolehan Lainnya Persediaan	475.200.000	0	100
Total	475.200.000	0	0

Beban persediaan per 31 Desember 2023 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Tabel 47. Mutasi Beban Persediaan

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah:	
Barang Konsumsi	0
Belanja Barang Persediaan (LRA)	0
Perolehan Lainnya Persediaan	475.200.000
Jumlah Mutasi Tambah	475.200.000
Mutasi kurang:	
Stok Opname per 31 Desember 2023	475.200.000

Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023	0

*Beban Barang dan
Jasa
Rp9.743.804.736,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.743.804.736,00 dan Rp1.408.037.077,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi Beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

*Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Juni 2022*

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	609.639.521	850.897.408	-28,35%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	1.620.000	122,22%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	172.380.000	18.610.000	826,28%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	789.682	-100,00%
Beban Barang Operasional Lainnya	32.400.000	0	100,00%
Beban Bahan	1.051.459.200	138.352.950	659,98%
Beban Honor Output Kegiatan	5.695.550.000	91.400.000	6131,46%
Beban Langganan Listrik	110.172.730	23.519.687	368,43%
Beban Langganan Telepon	7.400.000	0	100,00%
Beban Langganan Air	12.965.800	1.594.900	712,95%
Beban Sewa	1.801.102.640	179.512.450	903,33%
Beban Jasa Profesi	125.000.000	63.200.000	97,78%
Beban Jasa Lainnya	151.426.400	38.540.000	292,91%
Total	9.743.804.736	1.408.037.077	592,01%

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 592,01% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2022. Kenaikan beban barang dan jasa disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta dikarenakan adanya pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Provinsi Lampung, sehingga terjadi penambahan beban barang dan jasa, terdapat juga pokja gakkumdu, serta banyaknya kegiatan tatap muka, sehingga beban barang dan jasa terkait kegiatan tatap muka semakin meningkat, serta dikarenakan berlangsungnya pengawasan tahapan pemilihan umum.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 49. Mutasi Pada Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)	
Belanja barang dan jasa	10.304.004.736
Beban sewa atas sewa dibayar dimuka tahun anggaran yang lalu	0
Beban yang masih harus dibayar	0
Barang konsumsi tahun anggaran yang lalu	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	85.000.000
Jurnal balik atas beban tahun anggaran yang lalu	0
Jurnal Manual atas Pengadaan Penanda Identitas PTPS	475.200.000
Beban Persediaan konsumsi	0
Jumlah Mutasi Kurang	560.200.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	9.743.804.736

*Beban Pemeliharaan
Rp.419.241.987,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp419.241.987,00 dan Rp51.804.286,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset

lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

*Tabel 50. Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.776.000	30.533.000	672%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186.756.987	21.271.286	778%
Total	419.241.987	51.804.286	709%

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 709% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2022. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta terdapat biaya untuk BBM kendaraan operasional Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Tidak terdapat perbedaan jumlah belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.974.912.533,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing adalah sebesar Rp3.974.912.553,00 dan Rp747.362.296,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 51. Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	180.852.537	98.453.447	84%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.005.460.000	79.130.000	2434%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.442.281.000	483.457.000	198%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	380.734.016	86.321.849	341%
Total	3.974.912.553	747.362.296	432%

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 432% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2022. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta dikarenakan sudah diperbolehkannya kegiatan tatap muka sehingga harus memenuhi undangan kegiatan dari dalam kota hingga luar kota.

Tidak terdapat perbedaan jumlah belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp76.930.071,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp76.930.071,00 dan Rp19.954.286,00 atau mengalami kenaikan sebesar 42%. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama

masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 52. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.187.071	12.082.786	406%
Beban Amortisasi Software	15.168.000	7.871.500	93%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	575.000	0	100%
Total	76.930.071	19.954.286	286%

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 286% dibandingkan pada tahun anggaran 2022. Kenaikan beban penyusutan dan amortisasi disebabkan pada tahun sebelumnya Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung baru menjadi Satuan Kerja Mandiri dan sebagian besar sudah terealisasi pada saat masih menjadi anak satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Tidak terdapat perbedaan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

*Surplus/(Defisit) Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.610.000,00*

D.8 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.610.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.610.000	0	100
Jumlah Pendapatan	1.610.000	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	1.610.000	0	100

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan bonus dari pembelian peralatan dan mesin sesuai dengan No SP2D 230171303001732 tanggal 28 Maret 2023, bonus tersebut berupa:

Tabel 54. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.610.000

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit LO
(Rp15.442.853.974,00
)*

D.10 Surplus/(Defisit) LO

Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp15.442.853.974,00) dan (Rp2.601.387.251,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

Ekuitas Kementerian/Lembaga adalah kekayaan bersih Kementerian/Lembaga yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp63.052.784,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.052.784,00 dan Rp. 0,00.

Defisit LO
(Rp15.442.853.974,00
)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp15.442.853.974,00) dan (Rp2.601.387.251,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar
Entitas
Rp26.137.881.103,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.137.881.103,00 dan Rp2.664.440.035,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 55. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Diterima dari Entitas Lain	(24.817)	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.137.905.920	2.664.440.035
Pengesahan Hibah Langsung	10.000.000.0000	0
Jumlah Belanja	26.137.881.103	2.664.440.035

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Diterima dari Entitas
Lain (Rp24.817),00*

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp24.817,00 merupakan PNBPN yang diperoleh dari bunga giro yang terdapat di rekening giro Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tahun 2023.

*Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp16.137.905.920,00*

E.3.2 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp16.137.905.920,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni (RM), yang terdiri dari:

*Tabel 56. Ditagihkan ke Entitas Lain
Per 31 Desember 2023*

Ditagihkan ke Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	1.229.599.444
Belanja Barang	14.698.006.476
Belanja Modal	210.300.000
Total	16.137.905.920

*Kenaikan dan
Penurunan Ekuitas
Rp10.695.027.129,00*

E.4 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.695.027.129,00 dan Rp63.052.784,00.

*Tabel 57. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit LO	(15.442.853.974)	(2.601.387.251)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	0
Transaksi Antar Entitas	26.137.881.103	2.664.440.035
TOTAL	10.695.027.129	63.052.784

Ekuitas Akhir
Rp10.758.079.913,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir periode pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.758.079.913,00 dan Rp63.052.784,00. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp63.052.784,00 ditambah kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp10.695.027.129,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F. 1 Kejadian Penting Tahun 2023

- Pengangkatan CPNS Bawaslu Kota Bandar Lampung menjadi PNS

Tabel 58. PNS Baru Bawaslu Kota Bandar Lampung

No	Nama NIP	Jabatan	No. SK
1	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N. 199504222022032001	Pengawas Pemilihan Umum	0291.1/KP.01.01/SJ/02/2023
2	Faradhika Nitasya, S.Si. 199404182022032003	Analisis Keuangan	0342.1/KP.01.01/SJ/02/2023
3	Iranda Putri, S.I.P. 199612282022032001	Pengawas Pemilihan Umum	0381.1/KP.01.01/SJ/02/2023
4	Wahyuningsih, S.I.P. 199712052022032001	Analisis Pemilihan Umum	0559.1/KP.01.01/SJ/02/2023

F. 2 Pembentukan Satker Bawaslu Kota Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal No. 1210/PR.03.01/SJ/04/2022 tertanggal 25 April 2022 tentang Usulan Penambahan Satker Bawaslu Kabupaten/Kota, diterbitkan surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu dengan Nomor: S-211/AG/AG.5/2022 tertanggal 02 Juni 2022 diputuskan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Satker dari 31 Satker baru yang terbentuk. Berikut susunan Pejabat Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung:

Tabel 59. Pejabat Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat/Gol
1	Firdinan Islami, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Pembina/IVa
2	Bintarawan, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Penata Tk.1/IIIId

Berikut susunan Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung:

Tabel 60. Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan
1	Apriliwanda, S.H.	Ketua
2	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	Juwita, S.H., M.M.	Koordiv SDMO dan Diklat
4	Oddy Marsa JP., S.H., M.H.	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin
5	Muhammad Muhyi, S.Sos.I.	Koordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas

F.3 Penjelasan Mengenai Rekening Pemerintah

Berdasarkan surat KPPN tentang persetujuan pembukaan rekening pengeluaran Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung (419487) memberikan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Adapun selain itu, berdasarkan surat KPPN tentang persetujuan pembukaan rekening pengeluaran Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung (419487) memberikan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Tabungan Negara (BTN) untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Rekening Penyaluran Dana Hibah (RPDH), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rekening Pemerintah

No Rekening	Nama Rekening	Cabang
652654194871000	BPG 017 BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG	BANK BRI KC TANJUNG KARANG

Selain rekening pengeluaran, adapun Rekening Dana Pemilu yang dibuat untuk keperluan penyaluran dana pemilu ke masing-masing kecamatan yang ada di Bandar Lampung, berikut Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan untuk menampung Dana Pemilu:

Tabel 62. Rekening Pemerintah Lainnya

No Rekening	Nama Rekening	Cabang
009801005433300	RPL 017 PS BAWASLU KOTA BALAM UNTUK RDP	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
80127004194872401	RPL017 PDHL PILKOT BDR LPG 29ZQC7JA	BANK BTN KC BANDAR LAMPUNG
8012700 4194872 501	RPL017 PDH PILKOT BDR LPG 29ZQC7JA	BANK BTN KC BANDAR LAMPUNG

Tabel 63. Rekening Giro Kecamatan

No	No Rekening	Nama Pemilik Rekening Giro	Cabang
1	009801005443305	PANWASLU KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
2	009801005442309	PANWASLU KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
3	009801005439306	PANWASLU KECAMATAN LABUHAN RATU	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
4	009801005438300	PANWASLU KECAMATAN SUKABUMI	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
5	009801005445307	PANWASLU KECAMATAN KEDAMAIAN	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
6	009801005450302	PANWASLU KECAMATAN RAJABASA	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
7	009801005448305	PANWASLU KECAMATAN SUKARAME	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
8	009801005446303	PANWASLU KECAMATAN ENGGAL	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
9	009801005451308	PANWASLU KECAMATAN TANJUNG SENANG	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
10	009801005454306	PANWASLU KECAMATAN LANGKAPURA	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
11	009801005459306	PANWASLU KECAMATAN KEDATON	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
12	009801005455302	PANWASLU KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
13	009801005447309	PANWASLU KECAMATAN WAY HALIM	BANK BRI KC TANJUNG KARANG

14	009801005452304	PANWASLU KECAMATAN KEMILING	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
15	009801005449301	PANWASLU KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
16	009801005444301	PANWASLU KECAMATAN BUMI WARAS	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
17	009801005456308	PANWASLU KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
18	009801005458300	PANWASLU KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
19	009801005453300	PANWASLU KECAMATAN PANJANG	BANK BRI KC TANJUNG KARANG
20	009801005457304	PANWASLU KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN	BANK BRI KC TANJUNG KARANG

F.4 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memutuskan atas nama Firdinan Islami, S.STP., M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Bawaslu Kota Bandar Lampung. Tidak terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Tahun Anggaran 2023. Berikut susunan Pejabat Perbendaharaan Bawaslu Kota Bandar Lampung per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Pejabat Perbendaharaan

No	Nama	Jabatan	No SK	Tanggal SK
1	Firdinan Islami, S.STP., M.Si.	KPA	0247/KU.01.00/K1/06/2022	03 Juni 2022
2	Firdinan Islami, S.STP., M.Si.	PPK	184a/KU.01.00/LA-14/03/2023	27 Maret 2023
3	Bintarawan, S.E.	PPSPM	184a/KU.01.00/LA-14/03/2023	27 Maret 2023
4	Faradhika Nitasya, S.Si.	BP	184a/KU.01.00/LA-14/03/2023	27 Maret 2023

F.5 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas Lainnya di KL dari Hibah;
2. Kas Lainnya di BP;
3. Beban Perjalanan Dinas; dan
4. Peralatan dan Mesin.

Selanjutnya, Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

F.6 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No: PE.09.02/S-333/PW08/2/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada BAWASLU Kota Bandar Lampung dan Berita Acara dan Notisi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2023. Sehubungan dengan itu Bawaslu Kota Bandar Lampung setuju atas saran, masukan, perbaikan dari Tim BPKP Provinsi Lampung dan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan menjadikannya pedoman dalam Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

Kemudian berdasarkan Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi

Lampung No: PE.04.02/S-863/PW08/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Audit Tujuan Tertentu atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sehubungan dengan itu Bawaslu Kota Bandar Lampung setuju atas saran, masukan, perbaikan dari Tim BPKP Provinsi Lampung dan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan menjadikannya pedoman dalam Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

F.7 Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN)

Pada Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) serta Capaian Output yaitu dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 65. Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023

Program/Kegiatan Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
6661. Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.683.725.000	2.349.755.587	87,56	Lembaga, Laporan, dan Unit	33	33	100
6662. Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	4.488.000	1.375.000	30,64	Laporan	1	1	100
6838. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	9.292.081.000	8.817.252.034	94,89	Lembaga, Daerah, Orang	352	352	100
6839. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.258.510.000	876.133.470	69,62	Laporan, Perkara	6	6	100
6840. Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	7.050.000	1.050.000	14,89	Laporan, Berkas, Perkara, Perkara	2	2	100

6841. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	46.375.000	45.395.000	97,89	Laporan	3	3	100
6842. Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	733.576.000	244.686.994	33,36	Laporan, Berkas, Perkara, Perkara	7	7	100
6843. Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	2.179.884.000	1.456.705.400	66,82	Laporan, Berkas, Perkara, Perkara	10	10	100
6845. Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	172.900.000	0	0,00	Laporan, Berkas, Perkara, Perkara	1	1	100
6848. Pengawasan Logistik	1.701.639.000	155.739.384	9,15	Laporan, Berkas, Perkara, Perkara	8	8	100

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG 419487

Tgl Data : 20/02/24 6:29 PM
Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	20,511,195,000	16,137,905,920	(4,373,289,080)	79	3,055,389,000	2,595,427,965	(459,961,035)	85
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

BINTARAWAN
197803261997031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	85,000,000	0	85,000,000	0.00
Persediaan	475,200,000	0	475,200,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	10,560,200,000	0	10,560,200,000	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	329,591,800	132,681,800	196,910,000	148.41
AKUMULASI PENYUSUTAN	(146,152,087)	(84,390,016)	(61,762,071)	73.19
JUMLAH ASET TETAP	183,439,713	48,291,784	135,147,929	279.86
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	51,275,000	36,275,000	15,000,000	41.35
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(36,682,000)	(21,514,000)	(15,168,000)	70.50
JUMLAH ASET LAINNYA	14,593,000	14,761,000	(168,000)	(1.14)
JUMLAH ASET	10,758,232,713	63,052,784	10,695,179,929	16,962.26
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	152,800	0	152,800	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	152,800	0	152,800	
JUMLAH KEWAJIBAN	152,800	0	152,800	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,758,079,913	63,052,784	10,695,027,129	16,962.02
JUMLAH EKUITAS	10,758,079,913	63,052,784	10,695,027,129	16,962.02
JUMLAH EKUITAS	10,758,079,913	63,052,784	10,695,027,129	16,962.02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,758,232,713	63,052,784	10,695,179,929	16,962.26

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penanggung Jawab UAK/PA
Kuasa Pengguna Anggaran

BINTARAWAN
197803261997031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:29 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,817	0	24,817	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	24,817	0	24,817	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	24,817	0	24,817	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,229,599,444	374,229,306	855,370,138	228.568
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	9,743,804,736	1,408,037,077	8,335,767,659	592.013
Beban Pemeliharaan	419,241,987	51,804,286	367,437,701	709.281
Beban Perjalanan Dinas	3,974,912,553	747,362,296	3,227,550,257	431.859
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:29 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	76,930,071	19,954,286	56,975,785	285.532
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,444,488,791	2,601,387,251	12,843,101,540	493.702
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,444,463,974)	(2,601,387,251)	(12,843,076,723)	493.701
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,610,000	0	1,610,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,610,000	0	1,610,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,610,000	0	1,610,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15,442,853,974)	(2,601,387,251)	(12,841,466,723)	493.639
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,442,853,974)	(2,601,387,251)	(12,841,466,723)	493.639

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



BINTARAWAN

197803261997031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	63,052,784	0	63,052,784	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15,442,853,974)	(2,601,387,251)	(12,841,466,723)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	26,137,881,103	2,664,440,035	23,473,441,068	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,695,027,129	63,052,784	10,631,974,345	-
EKUITAS AKHIR	10,758,079,913	63,052,784	10,695,027,129	-

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BINTARAWAN

197803261997031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	16,137,905,920
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,817	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	24,817
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	193,272,960	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,856	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,015,968	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,613,390	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	13,720,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,385,900	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,776,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	32,007,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,360,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	716,087,900	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	227,598,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	609,639,521	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,600,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	172,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,400,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,526,659,200	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,695,550,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	110,172,730	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	7,400,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	12,813,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,886,102,640	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	125,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	151,426,400	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,776,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186,756,987	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180,852,537	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,005,460,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,442,281,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	380,734,016	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,300,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	15,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	230
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	242,000
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,914,260
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	11,521,250

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,100,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	11,488,645
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	322,000
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	945,400
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,291,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	34,415,000
JUMLAH			16,205,170,522	16,205,170,522

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BINTARAWAN

197803261997031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:29 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	10,000,000,000	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	85,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	475,200,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	329,591,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	146,152,087
0.0	162151	Software	51,275,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	36,682,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	152,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	16,137,905,920
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,817	0
0.0	391111	Ekuitas	0	63,052,784
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	10,000,000,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	24,817
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,610,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	193,272,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,626	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,015,968	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,613,390	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,720,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,385,900	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	9,776,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	31,765,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,360,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	716,087,900	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	227,598,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	605,725,261	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,600,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	172,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	32,400,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,039,937,950	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,694,450,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	98,684,085	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,078,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,020,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,801,102,640	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	125,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	151,426,400	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232,485,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (419487) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

Tgl Data : 20/02/24 6:29 PM

Tgl Cetak : 20/02/24 9:14 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186,756,987	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	180,852,537	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,971,045,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,442,281,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	380,734,016	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61,187,071	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	15,168,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	575,000	0
JUMLAH			26,385,580,408	26,385,580,408

Keterangan :

FINAL

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



BINTARAWAN
197803261997031003

